

Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa*

PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini, untuk bersama-sama membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh bangsa kita.

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada segenap anggota keluarga besar Yayasan Prasetiya Mulya yang dalam rangka peresmian gedung Yayasan Prasetiya Mulya mengadakan diskusi panel pada hari ini, bersama dengan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia. Berdirinya gedung ini kiranya merupakan manifestasi cita-cita luhur para pembentuk serta penggagas Yayasan Prasetiya Mulya.

Berkaitan dengan itu, saya menyambut baik diselenggarakannya diskusi panel ini, walaupun diskusi ini dilaksanakan selama satu hari. Sambutan baik saya itu bukanlah tanpa alasan. Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan beberapa uraian dan pemikiran-pemikiran yang saya harapkan dapat menjadi bahan bagi diskusi ini maupun bagi pemikiran-pemikiran dan tindak lanjut di kemudian hari nanti.

Dari tema diskusi ini saya melihat ada dua materi yang menjadi perhatian: Pertama, tentang kehidupan kebangsaan kita; dan kedua, tentang peranan dunia usaha di dalam kehidupan kebangsaan kita.

*Sambutan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam pada Diskusi Panel tentang "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa-Ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa," yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetiya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia, Jakarta, 8 November 1984.

Dikembangkannya dua materi ini dalam suatu diskusi menunjukkan adanya kesadaran bahwa dunia usaha di Indonesia merupakan bagian dari kehidupan kebangsaan kita. Lebih dari itu hal ini menunjukkan pula terdapatnya keinginan untuk menegaskan partisipasi dan sumbangan para pengusaha di dalam tugas pengembangan bangsa kita. Hal ini membawa suatu konsekuensi yang amat penting, yakni bahwa segala sesuatunya itu harus kita laksanakan dengan menghayati dan mengamalkan semangat, cita-cita serta paham kebangsaan kita.

Mendalami makna dari konsep kebangsaan kita itu akan membantu kita mengenali diri kita dan menjawab pertanyaan mengenai siapakah kita bangsa Indonesia ini. Definisi diri semacam ini amat penting, dan akan membantu memperjelas tempat, peranan, tugas maupun pengabdian kita masing-masing. Untuk itulah maka saya ingin memulai uraian saya dengan mengajak saudara-saudara peserta diskusi ini menelusuri pertumbuhan konsep kebangsaan kita dan mendalami maknanya.

CITA-CITA KEBANGSAAN KITA

Kebangsaan merupakan hal yang amat fundamental bagi perjuangan kita, dan karena itu juga merupakan hal yang fundamental bagi pembangunan kita. Kebangsaan itu telah menjiwai dan mengantar pergerakan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Kebangsaan itulah yang mengantar rakyat Indonesia mewujudkan kedaulatannya.

Di sekitar awal pertama abad ke-20 ini terjadilah peristiwa penting di dalam sejarah kita, yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan tersebut dipacu oleh berbagai faktor, didorong oleh berbagai aspirasi, didukung oleh berbagai motivasi. Pada awalnya gerakan tersebut menggejala sebagai gerakan yang majemuk dan terpisah-pisah. Namun di dalam perkembangannya gerakan yang majemuk dan terpisah-pisah itu menemukan titik temu mendasar yang makin lama makin menyatukan. Di dalam perkembangan sejarah itu kebhinnekaan berpadu dengan ketunggalikaan. Dan konsep kebangsaan merupakan dinamika batin yang amat menentukan. Setapak demi setapak akan tetapi semakin jelas dan semakin tegas semangat dan cita-cita kebangsaan membentuk pertumbuhan kebangkitan nasional.

Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan itu terungkap menjadi makin jelas dalam bentuk Sumpah Pemuda, di mana diikrarkan cita-cita satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

Walaupun mengalami pasang-surut sebagai akibat dari berkembangnya bermacam-macam aliran, aspirasi dan ideologi yang mempengaruhi sejarah

perjuangan rakyat Indonesia, akan tetapi kebangsaan itulah yang akhirnya mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan kita di dalam pernyataan yang berbunyi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi telah melahirkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Dan proklamasi itu pun segera disusul dengan dibentuknya Konstitusi Negara Kebangsaan, yang didasarkan atas satu Ideologi Kebangsaan yaitu Pancasila.

Keseluruhan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Batang Tubuh dan Penjelasan-penjelasan pada hakikatnya telah dijiwai oleh konsepsi kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Undang-Undang Dasar itu maka konsepsi kebangsaan menemukan wujudnya yang formal dan konstitusional.

Demikianlah maka terdapat suatu jalur kontinuitas dinamika kebangsaan, yang terungkap di dalam Sumpah Pemuda dan yang menggelora di dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mewujudkan di dalam Pancasila dasar negara, pandangan hidup dan ideologi nasional, sebagai satu-satunya asas di dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Konsep kebangsaan adalah konsep dinamis, sebab kebangsaan itu adalah dinamika. Kebangsaan itu pun tidak berhenti dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan serta disusunnya konstitusi dan ideologi kita itu. Kebangsaan itu tetap menjiwai dan mengantar rakyat Indonesia menghadapi berbagai rintangan dan cobaan sejarahnya, baik yang berbentuk agresi penjajah, pertikaian politik dan ideologi yang berlarut-larut maupun infiltrasi dan subversi dari berbagai kekuatan baik dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan pengalaman sejarah itu Orde Baru telah sampai kepada suatu kesimpulan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang pada hakikatnya juga berarti tekad untuk menghayati dan mengamalkan konsep kebangsaan kita itu secara murni dan konsekuen.

Dengan tekad yang demikian Orde Baru telah berhasil merintis jaman pembangunan di dalam sejarah kita. Fase demi fase telah dilalui, Pelita demi Pelita dilaksanakan, dan pembangunan itu pun tidak lain daripada usaha mengisi kemerdekaan kebangsaan kita, membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita. Karena itulah maka pembangunan itu kita nyatakan sebagai pengamalan Pancasila. Pembangunan harus kita laksanakan berdasarkan kepada sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan dan cara kerja kebangsaan kita.

Marilah selanjutnya kita selami dan kita telusuri makna, isi dan substansi dari konsep kebangsaan kita.

Pertama-tama ingin saya kemukakan bahwa walaupun nasionalisme yang tumbuh di Barat merupakan salah satu faktor yang memacu tumbuhnya paham kebangsaan kita, akan tetapi pertumbuhan sejarah menunjukkan bahwa konsep kebangsaan kita itu tidak sepenuhnya sama dengan konsep nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Barat. Itulah sebabnya mengapa istilah kebangsaan seyogyanya lebih kita pertahankan, karena istilah kebangsaan itu adalah istilah dari bahasa kita sendiri, di samping itu juga menunjukkan bahwa kebangsaan kita tidak sepenuhnya sama dengan paham nasionalisme yang tumbuh di tempat lain.

Paham kebangsaan kita itu tumbuh sebagai identitas diri dari perjuangan rakyat Indonesia, yang sifat dan coraknya majemuk, identitas yang mampu membentuk perjuangan rakyat itu menjadi perjuangan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka itu konsep kebangsaan kita telah tumbuh sebagai suatu konsepsi perjuangan yang mengatasi paham golongan dan perorangan, yang menyatukan. Karena itu konsep kebangsaan tersebut menolak segala bentuk diskriminasi, baik itu karena faktor daerah, asal-usul, keturunan ataupun kedudukan, kemampuan sosial ataupun ekonomi, agama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya maka konsep kebangsaan kita sama sekali tidak dilandaskan kepada konotasi *etnisitas*. Adalah suatu kesalahan yang besar apabila kita menghayati dan mengamalkan cita-cita dan semangat kebangsaan kita dengan melandaskan kepada pengertian etnik. Adalah suatu kesalahan besar apabila di dalam menghayati dan mengamalkan kebangsaan itu baik langsung ataupun tidak langsung, baik sadar ataupun tidak sadar terkandung sikap diskriminatif dalam berbagai bidang dan berbagai bentuk. Itulah sebabnya maka konsep kebangsaan kita itu tidak menerima secara konsepsional pengertian mayoritas dan minoritas, pengertian tentang adanya warga negara kelas satu dan warga negara kelas dua. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Maka dari itu pernah saya kemukakan bahwa naskah proklamasi yang ditandatangani oleh proklamator-proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta, dilakukan atas nama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia; beliau-beliau tidaklah mewakili suku Jawa dan Minang. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan kebangsaan: dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Pembangunan yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu pun juga pembangunan kebangsaan: dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia, dan karenanya pembangunan itu kita pandang sebagai pengamalan Pancasila serta dilaksanakan dalam satu Wawasan Nusantara, di mana kita memandang Indonesia ini sebagai satu kesatuan

politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan, dilandasi jiwa persatuan kebangsaan kita.

REPELITA IV

Di dalam langkah awal memasuki Repelita IV ini konsep kebangsaan itu mempunyai urgensi dan relevansi yang amat tinggi. Itulah salah satu sebabnya mengapa saya dengan kesungguhan hati menyambut baik diskusi panel kebangsaan hari ini, dan saya sambut baik pula segala usaha memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan serta menggelorakan semangat kebangsaan itu.

Kita perlu bersyukur karena hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita I, II dan III telah mengantarkan kita bangsa Indonesia untuk dapat melakukan perakitan kerangka landasan pembangunan nasional yang dimulai di dalam periode Repelita IV ini untuk selanjutnya disempurnakan lagi di dalam masa Repelita V yang akan datang nanti. Kita berharap bahwa semuanya itu akan membuat kita bangsa Indonesia menjadi mampu untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan kita sendiri, membangun kehidupan sejahtera sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Berkaitan dengan tahap meletakkan kerangka landasan itu maka MPR menegaskan hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang berarti bahwa pembangunan itu dilaksanakan dengan dasar sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan maupun cara kerja kebangsaan, karena Pancasila adalah dasar negara kebangsaan dan ideologi kebangsaan kita pula. Kebangsaan adalah landasan dari kerangka landasan yang akan kita wujudkan. Kita, dalam masa Repelita IV ini, akan mulai meletakkan kerangka pembangunan ideologi kebangsaan. Kita mulai meletakkan kerangka landasan pembangunan politik kebangsaan, ekonomi kebangsaan, sistem sosial budaya kebangsaan, dan membuat kebangsaan kita sebagai dasarnya pertahanan keamanan negara kita.

Perakitan kerangka landasan pembangunan itu memang amat penting karena kita menjadi semakin terkait pula dengan perkembangan dunia, termasuk pergumulan dan percaturan di dalamnya. Tugas sejarah kita tidak akan menjadi makin ringan, akan tetapi akan menjadi semakin kompleks dan makin keras pula. Pembangunan nasional masih harus kita laksanakan di dalam situasi dunia yang tidak menentu, sarat dengan berbagai macam krisis dan permasalahan, dihantui oleh konflik dan peperangan. Di tengah dunia yang seperti itu kita harus tetap berpegang kepada konsep kebangsaan kita. Kebangsaan kita memang bukanlah konsep kebangsaan yang sempit dan tertutup. Namun kebangsaan kita juga memberikan identitas diri kita sebagai

bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Di dalam percaturan dunia seperti itu kita tidak dapat menjual diri kita, kita tidak pula dapat menutup diri kita. Kita harus berusaha menjadi mandiri, dan itu hanya dapat kita jangkau dengan menghayati konsep kebangsaan kita tersebut secara murni dan konsekuen, kreatif dan produktif.

Situasi hidup dan kehidupan kebangsaan maupun dunia ini akan menjadi makin majemuk, bergerak makin cepat dan jangkauannya saling mengait. Namun demikian kita perlu menyadari bahwa di dalam perkembangan dunia ini apa yang dinamakan kekuatan ekonomi merupakan faktor yang amat menentukan, berdampingan dengan kekuatan pengetahuan dan teknologi. Sudah barang tentu bahwa kemandirian kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu harus pula didukung oleh kekuatan ekonomi kebangsaan yang tangguh pula: kekuatan ekonomi yang mempunyai kualitas tinggi, akan tetapi tetap dilandasi oleh sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan dan cara kerja kebangsaan dalam gerak dan usahanya baik ke luar maupun ke dalam. Maka memang sekaranglah saatnya kita harus membangun kekuatan ekonomi seperti itu, sebagai bagian yang penting dari pembangunan nasional kita. Apabila pembangunan ekonomi itu dilaksanakan dalam semangat serta konsep kebangsaan, maka pertumbuhannya tidak akan merusak, sebaliknya bahkan akan mendukung pembangunan bidang-bidang kehidupan kebangsaan lainnya.

Sehubungan dengan itu semua, maka saya menginginkan agar kita betul-betul berusaha mendalami makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu, untuk selanjutnya menjabarkannya di dalam wujud satu sistem ekonomi nasional, ekonomi kebangsaan, yang dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan, dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila, diselenggarakan dalam lingkup Wawasan Nusantara.

Sistem ekonomi kebangsaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan adalah suatu tata ekonomi di mana keterkaitan dan keterpaduan diperhitungkan sebagai faktor. Itulah sebabnya maka di dalam sistem itu kita menolak baik etatisme maupun free fight liberalism. Itulah sebabnya maka di dalam sistem ini kita mengembangkan secara terkait dan terpadu tiga kekuatan ekonomi nasional kita yaitu sektor negara, sektor masyarakat dan sektor swasta. Implikasi-implikasi operatif dari pemikiran dasar ini kiranya perlu ditekuni lebih lanjut dan lebih mendalam dengan memperbandingkannya dengan paham-paham di luar sistem kebangsaan kita, untuk diambil hikmah dan pelajarannya: kita tolak yang tidak sesuai, kita terapkan yang dapat memperkaya dan memperkuat kehidupan kebangsaan kita. Dengan memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan itu dapatlah diletakkan kerangka landasan pembangunan tata ekonomi kebangsaan kita.

PEMBANGUNAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Kebangsaan adalah jiwa dan perekatnya kerangka landasan pembangunan nasional kita. Untuk itulah maka pemerintah amat memperhatikan pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan krida ke-3 dari Pancakrida, pemerintah berusaha untuk makin meningkatkan pembangunan bidang ideologi dengan makin memasyarakatkan P-4 dan Demokrasi Pancasila dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa itu. Konsep kebangsaan yang harus dihayati secara dinamis dan kreatif itu harus didukung dengan pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa secara terus-menerus.

Masyarakat kita adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Paham kebangsaan kita adalah suatu konsepsi yang memberi kemungkinan paling baik bagi masyarakat seperti itu untuk mengalami perkembangan dan kesejahteraan dengan sebaik-baiknya. Memang, di dalam masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika seperti itu, ada terkandung elemen-elemen kebhinnekaan yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi kekuatan disintegratif. Memang, sebaliknya kita pun tidak dapat menetapkan suatu ketunggalikaan yang mematikan kebhinnekaan. Kita juga tidak dapat memaksakan salah satu faktor kebhinnekaan saja untuk menjadi acuan normatif bagi kehidupan seluruh bangsa dan negara kita ini.

Problematis Bhinneka Tunggal Ika itu akan menjadi makin menggawat disebabkan karena pembangunan telah menghasilkan kemajuan-kemajuan, dan kemajuan itu selanjutnya akan membawa kehidupan bangsa kita memasuki fase diversifikasi. Diversifikasi itu tidak dapat kita elakkan, akan tetapi perlu kita bangun agar tidak menjadi faktor yang mengacau-balaukan kehidupan bangsa kita. Semua itu adalah tuntutan proses demokrasi kita, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa tidaklah dimaksudkan sebagai pembangunan yang sifatnya membekukan, sebaliknya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa itu dimaksudkan untuk menciptakan ruang gerak yang bahagia dan sejahtera bersama.

Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa itu dengan sendirinya menyentuh berbagai bidang kehidupan kebangsaan kita: ideologinya, politiknya, ekonominya, kehidupan sosial budayanya maupun pola pertahanan keamanan negaranya. Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Wawasan Nusantara, persatuan dan kesatuan bangsa itu pun harus menjangkau segenap rakyat di seluruh tumpah darah kita ini.

Di dalam kerangka itulah maka pembauran menempati posisi yang amat penting. Pembauran itu adalah proses fungsional di dalam pembangunan per-

satuan dan kesatuan bangsa tersebut. Pembauran itu mempunyai jangkauan yang amat luas, namun salah satu masalah yang kita rasa penting adalah pembauran yang menyangkut warga negara keturunan.

Proses pembauran itu menjadi penting oleh karena kita sudah bertekad menghayati konsep kebangsaan yang tidak menerima segala bentuk diskriminasi dan tidak didasarkan kepada konotasi etnis. Proses pembauran itu penting karena kita bermaksud membangun masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Proses pembauran itu penting karena kehidupan kebangsaan itu telah kita tuangkan ke dalam bentuk negara kebangsaan, dengan konstitusi kebangsaan maupun ideologi kebangsaan. Dengan demikian problematik pembauran tersebut tidak tumbuh dari ideologi dan konstitusi kita. Problem pembauran itu lebih merupakan problematik sejarah, problem psikologis dan sosiologis.

Dari sejarah kolonial kita mencatat bahwa dalam rangka melaksanakan sistem penjajahannya di bumi Indonesia ini, Pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pemisahan yang dogmatik struktural antara orang-orang Cina dan orang-orang pribumi. Pemisahan yang dogmatik struktural tersebut diberi kekuatan hukum dan meliputi segala bidang kehidupan: dari lahir hingga akhir hayatnya masing-masing. Secara dogmatik struktural terjadi pemisahan antara orang-orang Cina dan pribumi di dalam sistem hukumnya, di dalam pemukimannya, di dalam kegiatan kehidupannya, di dalam bidang ekonomi, dan di bidang pendidikannya. Warisan kolonial inilah kiranya yang harus kita tinggalkan. Pada kesempatan ini, sebagai Menteri Dalam Negeri, yang mempunyai tugas membangun persatuan dan kesatuan bangsa itu, perkenankanlah saya menyampaikan seruan kepada para peserta diskusi ini, kepada segenap lapisan masyarakat dan seluruh jajaran Departemen Dalam Negeri, untuk menyadari kenyataan itu, dan membangun sikap baru: meninggalkan dan menanggalkan warisan kolonial seperti itu, dan mulai mengenakan sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan semangat dan cita-cita kebangsaan kita. Kemerdekaan kebangsaan yang sudah dicapai hendaknya diwujudkan dengan disingkirkannya segala bentuk diskriminasi, untuk digantikan dengan semangat persatuan dan kesatuan, baik di dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan serta hukum.

Pola dogmatik struktural yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial itu telah menumbuhkan sikap dan perilaku psikologis yang penuh kecurigaan, saling asing-mengasingkan yang satu dengan yang lain, menjadi makin jauh dalam jarak maupun perasaan, yang kesemuanya itu mempersukar tumbuhnya rasa solidaritas bersama. Dan semua ini berlaku di dalam lingkungan yang secara sosiologis majemuk di dalam masing-masing golongan, di dalam masing-masing kelompok.

Segalanya itu merupakan latar belakang mengapa kemudian sampai dengan hari ini kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang kadang-

kadang pelik dan kadang-kadang merupakan sumber SARA yang setiap kali tampil di permukaan kehidupan masyarakat kita.

Itulah sebabnya maka walaupun konsep kebangsaan kita tidak mengenal bentuk-bentuk diskriminasi, tidak mengenal mayoritas-minoritas, tidak dilandasi oleh konotasi etnis, berkali-kali kita mengalami sikap serta tindakan yang rasialistis, menumbuhkan perasaan dan pengertian pembedaan antara "pribumi" dan "nonpribumi," antara asing dan asli. Masih lagi semua itu tidak jarang terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar keturunan Cina itu hidup dari sektor ekonomi, maka tiupan isu pribumi dan nonpribumi itu langsung saja dikaitkan dengan letupan isu kaya-miskin, walaupun dalam kenyataannya tidak semua keturunan Cina itu adalah kaya dan tidak semua yang lainnya adalah miskin, tidak semua keturunan Cina adalah berekonomi kuat dan tidak semua lainnya itu berekonomi lemah.

Itulah masalah besar yang harus ditangani, dan untuk itu Departemen Dalam Negeri akan mengembangkan apa yang telah dirintis sampai saat ini, yaitu Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), yang saya harapkan akan dapat menjadi salah satu partner dari Departemen Dalam Negeri di dalam menjalankan tugas dan usahanya membangun persatuan bangsa itu.

BIDANG USAHA

Walaupun pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa itu sifatnya menyeluruh dan terpadu, akan tetapi perlu saya kemukakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di bidang ekonomi adalah amat penting.

Pertama, perlu saya kemukakan lagi bahwa yang ingin kita bangun saat ini adalah kerangka landasan tata ekonomi kebangsaan, sebagai bagian dari kerangka landasan kehidupan kebangsaan kita. Ini berarti banyak pemikiran dan usaha perlu dicurahkan untuk mendalami dan seterusnya menjabarkan kerangka landasan tata ekonomi kebangsaan itu.

Kedua, ingin saya kemukakan pula bahwa sebagai akibat politik pecah-belah Pemerintah Kolonial, maka telah tercipta suatu pemisahan dogmatik struktural antara golongan keturunan Cina di satu pihak dan golongan di luar itu di lain pihak, khususnya yang menemukan manifestasinya di bidang ekonomi, terutama dunia usaha. Kenyataan yang bersumber dari sejarah masa lampau itu mempunyai ekor yang menimbulkan problem sosiologis dan psikologis, yang tidak jarang menjadi sumber kerawanan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini.

Ketiga, menyadari bahwa kita semakin terkait dengan perkembangan dunia di mana kekuatan ekonomi merupakan faktor yang amat penting, maka tidak ada pilihan lain lagi bahwa kita melaksanakan konsolidasi kekuatan-kekuatan ekonomi kebangsaan, baik konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan maupun konsolidasi di tingkat pelaksanaannya.

Kita tidak boleh membiarkan permasalahan menjadi makin berlarut. Tantangan yang kita hadapi akan makin banyak dan makin berat, baik di bidang pembangunan nasional maupun dalam kaitannya dengan perkembangan dunia. Kita masih akan dihadapkan kepada masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan, kesenjangan kaya-miskin serta problem pendidikan masyarakat. Kita masih akan dihadapkan kepada situasi ekonomi dunia yang belum menentu. Semuanya itu harus kita hadapi dengan dipegangnya konsepsi ekonomi kebangsaan yang jelas serta dengan rapatnya barisan kekuatan ekonomi kebangsaan itu pula.

Memang harus diakui bahwa walaupun banyak masalah dan hambatan yang berulang kali terjadi, bahkan bagaikan menahun kita alami, akan tetapi kita juga perlu mencatat beberapa hasil di dalam usaha menggalang pembauran di bidang usaha ini, yang dapat kita pegang sebagai modal bagi langkah-langkah lebih lanjut.

Pendalaman-pendalaman yang makin memperjelas makna pasal 33 UUD 1945 serta dengan penjabarannya yang dilaksanakan di dalam Repelita-Repelita kiranya merupakan sumber pengalaman yang amat penting. Di dalam pengalaman tersebut kita perlu berpegang kepada asas kesinambungan, perencanaan, peningkatan dan penyempurnaan. Pengalaman-pengalaman menunjukkan arah yang jelas, seperti halnya kita telah memetik banyak pelajaran dari pengalaman sejarah politik kebangsaan kita untuk pembangunan bidang politik kita.

Pertumbuhan tiga sektor ekonomi nasional kita ternyata telah pula menunjukkan betapa perlunya keterkaitan dan keterpaduan. Perkembangan itu mengungkapkan makna semangat kekeluargaan, bahwa persatuan lebih bermanfaat daripada perpecahan, bahwa kerjasama lebih menguntungkan daripada ketertutupan. Kesadaran seperti itu telah pula tumbuh di kalangan para pengusaha.

Di dalam dunia usaha swasta memang terdapat beberapa kelompok usaha, yang lazim digolongkan ke dalam kelompok pengusaha kuat, pengusaha menengah dan pengusaha lemah. Pengalaman telah membangkitkan kesadaran bahwa haruslah ada keseimbangan serta dengan keterkaitan yang komplementer dan saling mengisi antara yang satu dan yang lain.

Sebagai suatu langkah maju yang perlu dicatat kiranya adalah upaya Kadin yang dalam Temu Wicaranya telah sampai kepada Pernyataan Tekad Kerjasama dan Kesepakatan Pengusaha Nasional, di mana antara lain dinyatakan bahwa para pengusaha bertekad tanpa membedakan keturunan, pribumi dan nonpribumi, kesukuan, asal-usul, status sosial, daerah maupun agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semua ini merupakan ungkapan kesadaran awal tumbuhnya kekuatan ekonomi kita sebagai kekuatan ekonomi kebangsaan kita.

Kesadaran itu pun telah diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk memikirkan maupun mengusahakan wujud dari kerjasama seperti itu, baik yang berkaitan dengan permodalannya, keterampilannya, pengalaman manajerialnya maupun pendidikannya. Semua itu masih perlu ditingkatkan terus. Tumbuhnya jajaran dunia usaha menjadi jajaran ekonomi kebangsaan yang kreatif dan dinamis tentulah merupakan komponen yang amat penting bagi terwujudnya kerangka landasan bagi pembangunan dalam wawasan dan gerakan kebangsaan.

PENUTUP

Kiranya semua itu cukup menunjukkan betapa diskusi ini merupakan salah satu momentum di dalam gerak dan tumbuhnya kekuatan ekonomi kebangsaan kita itu. Kiranya menjadi jelas pula bahwa sambutan saya terhadap diskusi ini memang tidaklah tanpa alasan.

Saya harapkan diskusi ini sekurang-kurangnya akan dapat membangkitkan motivasi dan mengadakan inventarisasi dan sistematisasi dari pemikiran-pemikiran positif yang telah tumbuh dan berkembang sampai saat ini, mengadakan deteksi permasalahan, serta memberikan baik usaha pendalaman maupun tindak lanjut yang semakin nyata.

Saya tahu bahwa Yayasan Prasetya Mulya merupakan salah satu perintis di dalam perkembangan yang menggembirakan ini. Saya tahu pula bahwa semangat dan cita-cita itu pula yang telah melahirkan IMPM ini. Harapan saya semoga IMPM ini baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi pusat bangkitnya jajaran ekonomi kebangsaan kita, pada saat kita ingin menetapkan kerangka landasan ini maupun di masa yang akan datang nanti. Tidaklah berlebihan apabila IMPM menjadi salah satu tempat pendidikan dan kaderisasi dari kekuatan ekonomi kebangsaan kita.

Saya juga amat menghargai Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia, yang bersama dengan Yayasan Prasetya Mulya memprakarsai diskusi panel yang penting ini. Kenyataan ini menunjukkan betapa Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia sungguh menghayati semangat kebangsaan serta tanggap akan tantangan besar yang harus diselesaikan oleh bangsa kita.

Dengan semangat seperti itu saya harapkan diskusi ini dilaksanakan. Dengan semangat seperti itu pula saya harap usaha ini terus dilanjutkan. Untuk itu perkenankanlah saya menyatakan diskusi ini dimulai.

